

Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi *Dowry* di India terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India

Nining Kurnia¹, Khairur Rizki¹, Zulkarnain¹

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ningkurniaahalik@gmail.com

ABSTRACT

Gender-based violence continues to be an issue, especially in India with various causes, one of which is the tradition of giving dowry. The purpose of this study is to analyze how human security is influenced by the dowry tradition that causes acts of gender-based violence in India. This study uses feminism theory and uses the concept of human security to answer the problem formulation because all of them are able to explain the existence of acts of discrimination against women caused by the dowry tradition in India. This study uses a qualitative descriptive approach. The data is taken from secondary sources and analyzed through the interactive model of Miles and Huberman. This study finds the fact that discrimination against women in India as a result of the dowry tradition is difficult to abolish even though the Indian government has made various efforts to overcome it together with international organizations. However, the deep-rooted patriarchal system in Indian society is the main obstacle to tackling acts of discrimination against women to date.

Keywords: *Human security, Patriarchal Culture, The Influence of Dowry Tradition, Violence Against Women*

ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender terus menjadi masalah, terutama di India dengan berbagai macam penyebab, yang salah satunya adalah tradisi pemberian *dowry*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana keamanan manusia dalam pengaruh tradisi *dowry* yang menyebabkan tindakan kekerasan berbasis gender di India. Penelitian ini menggunakan teori feminisme serta menggunakan konsep *human security* untuk menjawab rumusan masalah karena semuanya mampu untuk menjelaskan adanya tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang disebabkan oleh tradisi *dowry* di India. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diambil dari sumber sekunder dan dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman. Penelitian ini menemukan fakta bahwa tindakan diskriminasi terhadap perempuan di India akibat dari tradisi *dowry* ini sulit untuk dihapuskan walaupun pemerintah India telah melakukan berbagai upaya penanggulangan bersama dengan organisasi internasional. Namun masih mengakarnya sistem patriarki di masyarakat India 2 menjadi hambatan utama untuk menanggulangi tindakan diskriminasi terhadap perempuan hingga saat ini.

Kata Kunci: Keamanan Manusia, Budaya Patriarki, Pengaruh Tradisi *Dowry*, Kekerasan Terhadap Perempuan

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan studi mengenai keamanan manusia dalam pengaruh praktik *dowry* dan dampaknya terhadap kekerasan berbasis gender di India. Penelitian ini mengartikan istilah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebagai setiap

tindakan yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologi bagi perempuan, termasuk ancaman atas tindakan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik terjadi dalam lingkungan publik maupun pribadi. Istilah berbasis gender digunakan karena kekerasan tersebut dibentuk oleh peran dan status gender dalam masyarakat (Tedjo et al., 2021). Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada keamanan manusia pada praktik tradisi *dowry* dan bagaimana hal tersebut memengaruhi tindakan kekerasan berbasis gender. Tradisi *dowry* merupakan tradisi yang mengharuskan perempuan untuk memberikan mahar/harta kepada pihak laki-laki sebelum melakukan pernikahan, bahkan setelah menikah pun pihak keluarga laki-laki sering kali meminta *dowry* tambahan secara terus menerus. Kekerasan akibat tradisi *dowry* ini biasa disebut dengan kekerasan langsung dan kekerasan langsung yang dimana perempuan sering mengalami kekerasan seperti penganiayaan dan pembunuhan terhadap perempuan akibat tidak terpenuhinya permintaan *dowry* tambahan dan dalam lebih ditekankannya *manpower* dalam segala bidang kehidupan di masyarakat (Siswanto, 2020).

Dowry kemudian dianggap sebagai hak bagi pengantin laki-laki ketika akan menikah dengan pengantin perempuan dan juga mulai dilakukan oleh masyarakat *non-Hindu* dan *Dalit*. Pihak pengantin perempuan yang tidak lagi mampu memenuhi permintaan *dowry* mengakibatkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan. Kekerasan terhadap perempuan akibat tradisi *dowry* tersebut apabila menimbulkan kematian maka akan disebut dengan istilah *dowry death*. Tradisi *dowry* dalam pernikahan di telah jelas menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan yang mengancam kehidupan perempuan di India baik secara individu maupun secara kolektif.

Adapun tradisi *dowry* ini diperburuk dengan adanya nilai-nilai fundamentalis di India terkait sistem patriarki yang lebih menekankan *manpower* di setiap bidang kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu adanya kasta terhadap kebudayaan di India yang menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan atas hak dan kewajiban masyarakat India secara turun temurun. Faktor tersebut membuat perempuan termarginalisasi bahkan mengalami tindak kekerasan (Mareta, 2017). Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan akibat tradisi dan perdamaian dalam arti luas, *dowry* di India menjadi salah satu contoh tradisi yang menyebabkan ketidaksetaraan gender. Bukan hanya itu, masih ditetapkannya budaya patriarki di India merupakan hal yang sulit untuk dihapus sehingga penerapan penanggulangan tindakan diskriminasi terhadap perempuan di India.

Selain itu, adanya sistem *culture of silence* yang berkembang di India juga telah mendorong perempuan untuk tidak mengumbar masalah rumah tangga yang dianggap sebagai masalah pribadi. Masyarakat di India terkadang lebih memilih menyelesaikan permasalahan terkait *dowry* dengan menggunakan personal law daripada hukum nasional. Sistem *culture of silence* yang merupakan konspirasi keheningan atau budaya diam telah menyebabkan masyarakat untuk tidak mengumbar permasalahan pernikahannya karena di anggap sebagai hal lain yang bersifat pribadi (CARE India, 2016). Dari penjelasan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan berupa “Bagaimana Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi *Dowry* terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India?”

TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa karya tulis yang secara substansial membahas tentang kekerasan manusia berbasis ketidaksetaraan gender yang dimuat dalam bentuk artikel, jurnal atau buku dalam melaksanakan penelitian ini. Dari sejumlah tulisan yang ada, penulis menemukan karya tulis yang membahas tentang kekerasan manusia berbasis kesetaraan gender, khususnya terjadi tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tindakan diskriminasi terhadap perempuan hampir sama di setiap negara seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dan psikologi. Namun fenomena kekerasan berbasis kesetaraan gender ini belum sepenuhnya bisa di atasi karena di beberapa negara masih menerapkan sistem patriarki. Dalam hal ini, peneliti akan lebih fokus membahas tentang kekerasan berbasis kesetaraan gender di India. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa referensi dan literatur yang relevan untuk menunjang tema yang dikaji.

Pertama, Annisa Yuliana Sari dan Shary Charlotte Henriette Pattipeilohy (2020) dalam tulisannya yang berjudul “Ketidaksetaraan Gender sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Jepang”. Penelitian ini membahas mengenai kekerasan dalam masyarakat dapat berupa dari berbagai bentuk bahkan tak luput dari pandangan kekerasan gender. Dalam perspektif antropologis pemahaman akan kekerasan gender memerlukan pemahaman konteks mengenai identitas gender, serta analisis situasional terkait dampak yang terjadi kepada gender dalam konteks sosial.

Karya penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender terhadap perempuan dan pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan dan masyarakat secara umum melalui pandangan budaya di Jepang, sistem yang telah terbangun dalam masyarakat dan negara secara struktural, serta dampak kekerasan itu sendiri yang berupa kekerasan langsung atau *direct violence*. Jika karya ini menggunakan teori segitiga kekerasan yang digagaskan oleh Johan Galtung, Bersama dengan konsep patriarki dan konsep hierarki gender/hegemoni maskulinitas dalam pendekatan feminisme, maka penelitian ini berbeda dari segi penggunaan teori, yaitu konsep *human security* dan segi topik spesifik yaitu tradisi pemberian *dowry* di India.

Kedua, Y.A Wahyudin dan Ambika Putri Swakartika Sari dalam tulisan yang berjudul Budaya Machismo dan Kekerasan Gender (Femicide) di El Salvador (A. P. S. Sari & Wahyuddin, 2020). Penelitian ini membahas tentang sejarah konflik dan perang yang panjang menjadi dampak baik dan dampak buruk terhadap eskalasi kekerasan di El Salvador yang mengakibatkan masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau kekerasan dan brutalitas bahkan pembunuhan. Dari berbagai macam aksi kriminalitas dan kekerasan tersebut perempuan menjadi salah satu pihak yang menjadi korban. Aksi-aksi kekerasan yang mayoritas dilakukan laki-laki dan ditambah dengan melekatnya budaya *machismo* yang lazim di kawasan ini semakin memperparah diskriminasi bahkan pembunuhan di El Salvador.

Karya ini membahas tentang bentuk kekerasan sosial atau pembunuhan dengan kekerasan terhadap perempuan di Meksiko dan Amerika Tengah. Sifat femisida dengan menganalisis situasi dari perspektif gender, sebagai bentuk ekstrim dari kekerasan berbasis gender yang kemudian menghubungkan femisida dengan diskriminasi, kemiskinan dan reaksi terhadap perempuan dieksplorasikan dalam tulisan ini. *Femicide* di Amerika Tengah dan Meksiko adalah ekspresi diskriminasi gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang beroperasi di ranah

privat dan publik. Dalam karya ini juga menjelaskan bahwa perlunya lembaga donor internasional untuk mengambil sikap untuk menghadapi kekerasan berbasis gender, karena kekerasan itu ada dalam semua proses sosial yang coba ditangani oleh program mereka.

Perbedaan penelitian Wahyudin dan Sari dengan penelitian ini adalah penggunaan teori atau konsep, seperti pemaknaan *femicide* yang disesuaikan dengan negara yang diteliti dan pengaruh budaya *machismo*. Penelitian tersebut lebih mendalami ketidakseimbangan peran laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan konsep *human security*, serta mengeksplorasi faktor dan dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan gender dalam konteks tradisi *dowry*.

Ketiga, Siti Hediati Rahminita dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Korelasinya Terhadap Ketidaksetaraan Gender di China (Hediati, 2017). Penelitian ini membahas organisasi internasional *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1979. Konvensi ini kerap kali disebut sebagai instrumen perundang-undangan mengenai hak perempuan secara internasional. Penelitian ini membahas tentang pengimplementasian konvensi CEDAW di China masih terdapat kesenjangan yang sangat signifikan berkaitan dengan hukum formal yang ditetapkan di China dengan hukum Internasional yang ada.

Kesenjangan tersebut mampu memberikan miskonsepsi mengenai makna yang sesungguhnya dari diskriminasi yang dimaksud. Miskonsepsi tersebut mampu mengantarkan China pada ketidaksesuaian dalam melakukan program dan kebijakan yang seharusnya dilakukan. Kemudian akan terjadi penerapan kebijakan yang tidak memadai dan tidak sejalan dengan mekanisme yang dibangun dalam sistem hukum Internasional yang telah ditetapkan. Kesetaraan gender menjadi pembahasan hangat dalam dunia internasional. Jika dilihat dari kaca mata feminisme, memperjuangkan kesetaraan gender merupakan perjuangan yang masih berlangsung sejak lama. Isu mengenai masalah ini dirasa terus menerus berkembang. Ketidaksetaraan gender masih sering ditemui dalam aspek kehidupan. Perbedaan penelitian Hediati dengan penelitian ini adalah fokus penelitian, yaitu implementasi organisasi CEDAW yang masih jauh dari sukses, serta kesenjangan yang masih terus ada. Penelitian ini memfokuskan analisis pada kekerasan gender dalam konteks keamanan manusia tradisi *dowry*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang memiliki karakteristik berbasis data yang dinyatakan dalam keadaan wajar atau *natural setting* dengan tidak mengubah data dalam bentuk angka ataupun simbol (Taylor, 1975). Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif konseptual karena tulisan ini berasal dari berbagai sumber dan konsep yang sudah dikaji sebelumnya (Muhadjir, 1996). Kemudian, untuk mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data melalui buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan dari berbagai literatur seperti jurnal, hasil penelitian terdahulu baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* yang didapatkan secara langsung.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *library research* (studi pustaka) yakni pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami dan bahkan mengutip teori dan konsep yang berasal dari jurnal domestik dan internasional, wawancara internasional yang dipublikasikan di internet, buku bahkan berita di internet. Semua data tersebut merupakan bagian dari data sekunder (Azwar, 2003). Penulis menggunakan analisis data berbasis *interactive model* untuk mengolah dan menganalisis data yang terdapat beberapa tahapanm seperti mengumpulkan data secara *online* dan *offline*, kemudian reduksi data yang merujuk pada penyederhanaan data-data mentah, penyajian data berupa bagan ataupun tabel, dan penarikan kesimpulan yang menginterpretasikan data-data dengan teori yang sudah digunakan (Singarimbun & Effendi, 1989).

KERANGKA PEMIKIRAN

FEMINISME

Teori feminisme merupakan serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki, dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat. Asumsi dasar feminisme menitikberatkan pada peran gender. Menurut pandangan feminisme, gender memainkan peran penting tidak hanya di rumah tangga tetapi juga di kancah politik internasional. Asumsi lainnya yang diterapkan kaum feminisme adalah pengembangan emansipasi perempuan dengan menghapuskan ketimpangan gender yang diakibatkan oleh budaya patriarki. Hal ini yang kemudian menjadi pelatuk akan terciptanya gerakan-gerakan perempuan yang mempertanyakan nilai dan norma mereka dalam kehidupan sosial (Ramadhan & Ma'sumah, 2018).

Latar belakang munculnya feminisme adalah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial bermasyarakat sehingga pada akhirnya akan timbul kesadaran dan upaya untuk menghilangkan ketidaksetaraan tersebut. Berkembangnya feminisme didorong oleh munculnya perempuan-perempuan modern dan kontemporer yang mulai mengintervensi banyak aspek kehidupan, mulai dari keterlibatan mereka dalam kegiatan militer dan ekonomi global dan berkembang berdampingan dengan teori Hubungan Internasional pada abad 20 (Burchill & Linklater, 2011).

Teori feminisme merupakan pemikiran bagaimana kesetaraan gender di seluruh aspek kehidupan manusia, bagaimana seorang individu mengidentifikasi dirinya, bagaimana perilaku di depan publik hingga posisi sosialnya ditentukan dari konsepsi gender yang berlaku di masyarakat. Istilah pemahaman feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realitas secara historis budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Bahkan di antara perempuan dengan jenis-jenis yang hampir mirip terdapat perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai pemikiran feminisme, sebagian besar atas alasan (misalnya akar budaya) patriarki dan didominasi laki-laki dan sampai resolusi final atas perjuangan perempuan akan non-eksploitasi lingkungan kebebasan kelas, latar belakang, ras dan gender.

Teori feminisme ini penulis gunakan karena dianggap cukup tepat untuk menganalisis penelitian ini karena dapat menjelaskan bagaimana kondisi tindakan diskriminasi gender terhadap perempuan di India terutama dalam tradisi *dowry*, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pandangan feminisme berasumsi bahwa penindasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki berawal dari adanya ideologi patriarki yang ada di India. Oleh karena itu, penggunaan teori feminisme oleh penulis karena cukup dapat menganalisis bagaimana tindakan diskriminasi gender terhadap perempuan di India terutama dalam pengaruh tradisi *dowry*. Pandangan feminisme berasumsi bahwa penindasan terhadap perempuan di India berawal dari adanya akar budaya sistem patriarki yang masih kental di India.

HUMAN SECURITY

Human security dalam laporan UNDP tahun 1994, didefinisikan sebagai berikut:

“*Human security* dapat memiliki dua aspek, yang pertama keamanan dari ancaman-ancaman yang bersifat kronis seperti kelaparan, penyakit, dan segala bentuk penindasan. Selain itu, keamanan manusia juga berarti perlindungan dari gangguan yang berbahaya dalam kehidupan sehari-hari seperti di rumah, kantor, maupun lingkungan komunitas” (United Nations Development Programme (UNDP), 1994).

Pergeseran indikator dan terminologi keamanan pra dan pasca perang dari keamanan nasional menuju keamanan manusia, menunjukkan adanya penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini mungkin terabaikan. *Sharbanaou Tadjbaksh* dan *Anuradha M. Chenoy* yang menyatakan bahwa keamanan manusia merupakan perlindungan bagi individu-individu dari risiko-risiko yang mengancam keamanan fisik dan psikologis, martabat dan kesejahteraan mereka, ketika objek yang dituju adalah individu, namun juga mencakup kesejahteraan dan martabat manusia. Oleh karena itu lingkungan yang dikategorikan mampu menyediakan keamanan manusia bagi penduduk di dalamnya untuk menjalani kehidupan yang stabil dan mampu menentukan kehidupan mereka sendiri (Tadjbaksh & Chenoy, 2007).

Konsep ini mewakili studi keamanan dari ortodoks yang berfokus terhadap keamanan negara, dimana subjek dari keamanan manusia adalah individu dan tujuan akhirnya adalah perlindungan manusia dari ancaman tradisional (militer) dan nontradisional seperti penyakit dan kemiskinan. Ini dari konsep *human security* ini bahwa perampasan keamanan manusia dapat berdampak pada stabilitas dan perdamaian pada setiap negara dan diantaranya negara-negara. pada tahun 1982, PBB menekankan perubahan fokus dari konsep *human security*, yang awalnya fokus dari keamanan yang menitikberatkan pada keamanan negara menjadi fokus pada keamanan masyarakat. Menurut UNDP *human security* bukan hanya mengenai perang antara negara, melainkan keamanan yang bersifat komprehensif. Secara luas mencakup kebebasan dari kebutuhan dasar, kebebasan dari rasa takut serta tersedianya perlindungan terhadap hak asasi manusia (Adinda FA, 2019).

Kemudian *United Nations Development Programme* (UNDP) mengkategorikan tujuh area yang terkoneksi satu sama lain dalam konsepsi *human security* yaitu : a) 8 keamanan ekonomi yang mengacu pada pendapatan yang tidak memadai dan tingkat pengangguran lebih banyak, b) keamanan pangan mengacu pada kelaparan karena kurangnya akses mendapatkan makanan, c) keamanan kesehatan merupakan ancaman

yang mengganggu keamanan kesehatan dan akses sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan, d) keamanan lingkungan mengacu pada perlindungan dari lingkungan sekitar yang mengancam kesejahteraan manusia, e) keamanan personal yang mengacu pada ancaman dari rasa takut dalam hal diskriminasi dalam bentuk kekerasan, f) keamanan komunitas mengacu pada perlakuan yang mengancam pada pihak perempuan, dan g) keamanan politik mengacu pada kurang terbebasnya dalam opresi politik.

Dari penjelasan UNDP terkait 7 kategori *human security* di atas, maka pengaruh tradisi *dowry* berbasis kekerasan gender ini masuk dalam kategori keamanan ekonomi (*economic security*) yang mengacu penghasilan dasar yang terjamin seperti kondisi yang mensyaratkan pemasukan tetap yang layak bagi setiap orang. Hal tersebut dapat tercapai dari pekerjaan yang layak dan menghasilkan. Selain itu, bisa juga dari jaringan pengamanan sosial yang dibiayai publik (negara). Keamanan komunitas (*community security*) yang menyangkut perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminasi pada suatu kelompok yang terdapat dari golongan berbeda seperti ras, agama, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian keamanan personal (*personal security*) yang mengacu pada keamanan dari kekerasan yang berupa ancaman dari rasa takut, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan dari berbagai ancaman seperti ancaman serangan dari negara lain, penyanderaan, ancaman terhadap perempuan berupa kekerasan domestik, penyiksaan dan pemerkosaan dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FAKTOR DAN DAMPAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DI INDIA

India merupakan negara dengan kawasan Asia Tenggara yang masih memiliki permasalahan kompleks mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di India, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, eksploitasi pihak perempuan dan juga tindakan diskriminasi. Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu berdasarkan golongan, ekonomi, agama, dan lainnya. Hal ini terlihat sampai sekarang di India, dimana perempuan tidak diizinkan dari membangun identitasnya sendiri. Perempuan selalu dilihat sebagai anak atau istri dari seorang pria sehingga otonomi kebebasan mereka di ambil. Tindakan diskriminasi terhadap perempuan sudah terjadi di usia muda. Masalah kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi di India (Madak, 2019). Berikut adalah faktor-faktor dan dampak-dampak kekerasan berbasis gender di India:

(1) Faktor-faktor Kekerasan Berbasis Gender di India

- Faktor Ekonomi

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di India juga menjadi alasan lain dari tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan. Meskipun India adalah negara dengan tingkat perekonomian tertinggi kedua di dunia, tidak dipungkiri masalah kemiskinan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Tingginya jumlah populasi dan ditambah dengan meningkatnya jumlah pengangguran menyebabkan kejahatan dan kekerasan pada negara terus meningkat. Di pemukiman negara bagian yang miskin tingkat kejahatan lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang lebih maju. Di negara bagian miskin ini,

jumlah kejahatan terbanyak dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak (Novia, 2018).

Faktor kemiskinan yang terjadi di India telah menyebabkan ketidaksetaraan gender bagi kaum perempuan di India. Kemiskinan membuat para kaum perempuan minoritas di India tidak bisa mendapatkan akses kependidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Kaum perempuan di India hanya mengandalkan hidup mereka ke suami atau keluarganya, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mandiri secara finansial yang menyebabkan mereka tetap bergantung kepada suami dan keluarganya. Para kaum perempuan di India umumnya hanya diberi tugas rumah seperti membersihkan rumah, menjaga anak, dan memasak. Mereka tidak memberikan kesempatan untuk bekerja di sektor-sektor bisnis. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan gender bagi kaum perempuan di India.

Diskriminasi dalam dunia kerja membuat perempuan di India tidak berdaya secara ekonomi dan terjatuh dalam kemiskinan. Jika pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dijalankan secara maksimal maka perempuan akan terus menggantungkan hidupnya dari pendapatan laki-laki. Akibatnya dalam kehidupan rumah tangga perempuan sering mengalami kekerasan langsung dan berujung dengan pembunuhan. Desakan budaya seperti *dowry* yang memaksa perempuan mampu secara ekonomi sebelum menikah pun menjadi beban perempuan-perempuan India.

Di dunia pekerjaan banyak dijumpai adanya tindakan diskriminasi, ketidakadilan, dan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi inilah yang menghambat peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, sehingga kesenjangan gender dalam ekonomi dan ketenagakerjaan saat ini masih cukup besar. Adanya ketidakadilan terhadap pekerja perempuan dalam penerimaan pekerjaan biasanya ditandai dengan adanya pengusaha yang lebih senang untuk menerima tenaga kerja laki-laki 10 dibanding perempuan. Hal ini laki-laki dianggap lebih terampil dan gesit serta tidak perlu memberikan perlindungan secara khusus seperti perlindungan dalam reproduksi yang harus dipenuhi pengusaha (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI, 2019).

- Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tombak dari kesejahteraan masyarakat. Saat ini, India memiliki tingkat kesejahteraan yang masih jauh di bawah negara-negara yang ada di Asia. Masalah yang timbul dari pendidikan yang ada di India dipengaruhi banyak faktor, dari masalah lingkungan sampai masalah internal pemerintahan. Namun, tingginya tingkat kemiskinan di India menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan. Remaja yang ada di India memiliki kebiasaan berpikir yang masih belum mencerminkan bangsa yang ingin berkembang, karena India masih banyak remaja yang belum sadar akan pentingnya pendidikan. Bahwa dengan pendidikan, seseorang akan mampu mengatur kehidupannya serta memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan kualitas negara India di mata dunia (Tedjo et al., 2021).

Selain keadaan ekonomi, perempuan di India juga terbentur dengan kebiasaan yang mengharuskan perempuan hanya cukup mengurus rumah dan keluarga. Keadaan di masa lalu itu kemudian berpengaruh di era sekarang yang seharusnya masalah tersebut sudah bisa teratasi, namun akibat kebiasaan yang sudah mengakar membuat hal tersebut susah untuk teratasi. Pemerintah ini sebenarnya telah membuat kebijakan mengenai pendidikan namun belum banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya hal tersebut (Tedjo et al., 2021).

Sejarah India yang dipengaruhi oleh datangnya Inggris pula yang menjadikan ketimpangan sosial serta pendidikan terjadi di India. Pada era kolonialisme di India, Inggris memiliki sistem pendidikan yang tidak merata dimana pendidikan hanya diperuntukkan untuk masyarakat kalangan atas saja dan menghiraukan rakyat miskin. Hal tersebut menjadikan masyarakat India yang memiliki tingkat ekonomi rendah menjadi tidak terpantau atau tidak diberikan pendidikan yang layak. Perempuan India yang berada di kasta bawah selalu menjadi pihak yang sangat dirugikan atas fenomena tersebut (Tedjo et al., 2021).

- Faktor Sosial

Di India, kasta keluarga menentukan banyak hal dalam kehidupan, misalnya dalam hal pekerjaan, tingkat kesucian secara rohani, dan kelas sosial. Golongan dari kasta paling rendah sering kali mendapat citra yang buruk dari masyarakat karena di anggap mengotori kesucian orang lain serta dilahirkan untuk dieksploitasi. Secara eksplisit sistem kasta digunakan untuk mendiskriminasi dan mendominasi sistem perekonomian, pendidikan serta budaya masyarakat. Kasta menimbulkan kristalisasi sosial dan juga dalam pembagian pekerjaan. Masyarakat dengan kasta rendah sulit untuk mendapat akses pekerjaan di pemerintahan, terlebih perempuan yang dilahirkan dari kasta rendah (Novianty, 2021).

Menurut Mareta (2017) dalam Novianty (2021), pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dari kasta rendah tidak terlepas dari istilah 3D yakni pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga (*dirty*), pekerjaan yang berbahaya (*dangerous*) dan pekerjaan yang membuat cita perempuan semakin rendah (*demeaning*). Hal tersebut kemudian membuat perempuan India semakin termajinalkan dan sering mendapat perlakuan tidak baik yang mengarah pada tidak kekerasan berbasis gender. Faktor sosial ini mengakibatkan perempuan India sering kali di anggap rendah dan menjadi beban bagi keluarganya. Masyarakat India menganggap anak perempuan adalah pembawa penderitaan sehingga banyak dari pasangan di India melakukan aborsi selektif terhadap bayi perempuan.

Selain itu, adanya sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat India menyebabkan kekerasan berbasis gender di India. Selama berabad-abad sistem patriarki telah ada di kalangan masyarakat India. Martabat seorang laki-laki dianggap tinggi dibandingkan martabat perempuan. Di India diskriminasi gender terjadi dimana-mana dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar. Perkembangan zaman seperti sekarang ini

memunculkan kesadaran atas hal-hak perempuan. Perempuan merasa bahwa mereka mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam berpolitik dan mempunyai keinginan untuk terlibat dalam pemerintahan. Para kaum perempuan menginginkan adanya persamaan hak sehingga sistem patriarki ini tidak lagi menyebabkan lagi kesenjangan sosial.

- Faktor Budaya

Sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat India yang lebih menekankan *manpower* di setiap bidang kehidupan yang membuat perempuan termarginalisasi bahkan mengalami tindakan kekerasan. Disisi lain, pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tindakan kekerasan terhadap perempuan, namun dalam penerapannya kurang memberikan dampak yang signifikan karena adanya tradisi-tradisi dan budaya di India yang telah mengikat sejak berabad-abad lalu merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah India. Tindakan kekerasan akibat tradisi atau budaya ini merupakan kekerasan yang disebut dengan kekerasan kultural karena masyarakat India masih menganut sistem patriarki yang sudah mengakar sejak lama (Mareta, 2017).

Beberapa kendala lain di antaranya seperti pola pikir dan praktik budaya patriarki yang telah lama mengakar pada masyarakat India. Praktik budaya patriarki adalah salah satu hambatan terbesar yang dihadapi dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini. Adanya budaya dan tradisi dalam sistem sosial di India yang mengandung nilai-nilai konservatif yang dianggap menyimpang, salah satunya adalah tradisi *dowry* yang semakin merugikan kaum perempuan. Tradisi *dowry* di India telah berlangsung sejak abad ke-13 Masehi. Tradisi *dowry* adalah pemberian berupa mahar/harta oleh pihak pengantin perempuan (atau keluarga pengantin perempuan) kepada pihak pengantin laki-laki (atau keluarga laki-laki) pada saat berlangsungnya perkawinan yang bahkan pemenuhan tradisi *dowry* ini akan berlangsung terus menerus bahkan setelah menikah, seperti hari raya, ulang tahun dan seperti acara besar lainnya. Tradisi tambahan *dowry* inilah yang sulit untuk dipenuhi oleh pihak keluarga perempuan (calon istri), mengingat besarnya pengeluaran untuk *dowry* sebelum melakukan pernikahan (Tedjo et al., 2021).

(2) Dampak Kekerasan Berbasis Gender di India

Dalam masyarakat India dikenal dengan adanya sistem kasta atau sistem tingkatan dalam masyarakat. Kasta keluarga menentukan banyak hal dalam kehidupan, misalnya dalam hal pekerjaan, tingkat kesucian secara rohani, dan kelas sosial. Golongan dari kasta paling rendah sering kali mendapatkan citra yang buruk dari masyarakat karena dianggap mengotori kesucian orang lain serta dilahirkan untuk di eksploitasi. Selain adanya sistem kasta, di India juga dikenal dengan nilai-nilai fundamentalis terkait sistem patriarki yang sangat merugikan kaum perempuan (Archer, 1983, p. 94). Terkait dengan kekerasan perempuan akibat tradisi dan perdamaian dalam arti luas, kekerasan akibat pengaruh tradisi *dowry* di India menjadi salah satu bentuk kekerasan secara langsung dan kekerasan kultural. Tradisi *dowry* dalam pernikahan jelas menjadi

sumber kekerasan terhadap perempuan yang mengancam kehidupan mereka baik secara individu maupun secara kolektif. India merupakan negara demokrasi besar yang telah lama merasakan perdamaian, kemerdekaan dan kebebasan dari penjajahan. Namun demikian kemerdekaan dan kebebasan India tidak secara langsung mampu menghilangkan penindasan terhadap kaum perempuan.

Secara umum laki-laki adalah penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender dapat berbentuk pemerkosaan, pelecehan, dan kekerasan fisik. Hal tersebut menyebabkan masalah pada kesehatan fisik, cedera berkepanjangan, kesehatan mental, dan hilangnya kepercayaan diri (World Health Organization (WHO), 2012). Selain itu, kekerasan di kehidupan rumah tangga juga paling umum terjadi dan dianggap tabu untuk diungkapkan dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat pada umumnya menganggap bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi, hal tersebut menjadikan kekerasan gender yang terjadi jarang dilaporkan. Akibat dari kekerasan berbasis gender ini bersifat fatal bagi korbannya. Korban dari kekerasan gender umumnya mengalami beberapa gangguan seperti:

- (1) Gangguan emosi adalah contoh kekerasan yang paling buruk. Kekerasan ini menyebabkan turunnya semangat hidup seseorang terutama perempuan, rasa ketakutan akan hal-hal tertentu, dan hilangnya rasa menghargai diri sendiri di pikiran korban. Bahkan gangguan emosional ini dapat memicu dampak lain seperti gangguan mental, fisik, dan pelecehan (Rafiun, 2020).
- (2) Gangguan mental merupakan dampak buruk yang akan merubah kepribadian seseorang dan lebih parah daripada korban kekerasan fisik. Gangguan mental dapat memberikan efek yang sangat parah pada korbannya. Gangguan mental yang dialami ini termasuk intimidasi, ancaman kekerasan, dan isolasi. Dari 22,4% perempuan yang menjadi korban kekerasan psikologis hingga berdampak gangguan mental di India, hampir 99% diantaranya memenuhi kriteria depresi berat dan juga 21,3% dilaporkan mengalami gangguan mental umum, menurut Patel (2020) dalam Rafiun (2020).
- (3) Cacat fisik merupakan dampak dari kekerasan fisik yang sering kali terjadi. Kekerasan fisik ini menyebabkan seseorang mendapatkan kekerasan fisik yang minor ataupun berakibat fatal bagi kondisi fisik seseorang. Mendorong, melempar, menjambak, memukul, menendang, menampar, dan membakar adalah contoh kekerasan yang paling sering dilakukan. Sekitar 41% perempuan di India pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan gender ini dapat mempersulit interaksi perempuan dengan lingkungannya, dan mengakibatkan mereka merasa asing dari lingkungan sekitarnya, menurut Kalokhe (2017) dalam Rafiun (2020).
- (4) Kematian Akibat Mahar (*Dowry Death*) yang diakibatkan oleh tradisi *dowry* yang berkembang seiring berkembangnya zaman. *Dowry death* ini merupakan bentuk kekerasan yang menimbulkan kematian karena perempuan sudah tidak sanggup untuk memenuhi permintaan *dowry* oleh

pihak laki-laki sehingga menimbulkan kekerasan yang berujung dengan kematian. Contohnya pada tahun 2009 sebanyak 8.383 kasus, tahun 2010 sebanyak 8.391 kasus, tahun 2011 sebanyak 8.618 kasus, tahun 2012 sebanyak 8.233, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 8.083, yang jika dijumlahkan menjadi 41.708 kasus kekerasan perempuan yang disebabkan oleh *dowry* (Pertiwi, 2021).

Tidak hanya itu, kasus kekerasan di India setiap tahun terus mengalami peningkatan 15,3% dalam kasus tindakan diskriminasi terhadap perempuan di 14 tahun 2021 bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data ini secara resmi dirilis oleh *National Crime Records Bureau* (NCRB). Pada tahun 2020 jumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 371.503 kasus, kemudian pada tahun 2021 semakin meningkat menjadi 428.278 kasus yang tercatat, sehingga menunjukkan peningkatan kasus kekerasan \pm 56.775 kasus sepanjang tahun. Mayoritas kejahatan yang dilakukan adalah seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penculikan anak dan perempuan, human trafficking, dan pemerkosaan terhadap perempuan (India News Desk, 2022).

ANALISIS KEAMANAN MANUSIA DALAM PENGARUH TRADIS *DOWRY*

Menurut Teays (1991) dalam Resen (2012), kasus kematian *dowry* yang sering kali dianggap sebagai sebuah hal yang biasa, menyiratkan sebuah bukti akan lemah dan rendahnya status perempuan dalam masyarakat India. Status yang lemah karena struktur sosial masyarakat membuat kaum perempuan untuk melawan atau bahkan membela diri terhadap kekerasan yang ditujukan padanya. Status yang rendah karena *dowry* membuat nyawa seseorang perempuan menjadi tidak berharga dan kematiannya menjadi sia-sia. Keamanan manusia, meskipun telah perhatian pada manusia secara umum tetapi juga memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok yang rentan, khususnya pada perempuan yang sering kali menjadi korban tindakan kekerasan.

Alasannya, di masyarakat mana pun ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat terjadi. Ketidakamanan personal membayangi kaum perempuan mulai dari kelahiran dan kematian. Di rumah, mereka menjadi anggota rumah yang terakhir makan menjadi terakhir untuk mendapatkan pendidikan di tempat kerja, perempuan menjadi yang paling terakhir dipekerjakan dan paling pertama dipecat. Kemudian, perempuan juga sering mengalami tindak kekerasan karena gendernya dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa (Resen, 2012). Dari komponen keamanan manusia, pengaruh tradisi *dowry* berbasis kekerasan gender ini masuk dalam kategori keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan komunitas (*community security*), dan keamanan personal (*personal security*):

(1) Keamanan Ekonomi (*Economic Security*)

Keamanan ekonomi merupakan salah satu aspek yang penting dalam keamanan manusia. Keamanan ekonomi yang semula berfokus pada negara kemudian mengalami pergeseran makna dan definisi yang mengarah pada situasi, dimana seseorang memiliki sumber pendapatan keuangan yang stabil dan memungkinkan terpeliharanya standar pemenuhan kehidupan dalam waktu dekat sehingga tidak terjadi kesenjangan di tengah masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Keamanan ekonomi bukan hanya sekedar membahas

permasalahan kemiskinan walaupun kemiskinan merupakan prioritas utama tetapi jauh dari itu beberapa ancaman dalam keamanan ekonomi juga mencakup pengangguran, akses ke sumber daya yang menghasilkan pendapatan. Walaupun pembahasan mengenai dimensi keamanan ekonomi lebih dari sekedar kemiskinan, namun isu kemiskinan masih menjadi prioritas utama (Chotimah et al., 2017).

Kelompok lain mendefinisikan keamanan ekonomi yang langsung mengacu pada kondisi hidup kelompok sosial dan individu, serta perlindungan terhadap kemiskinan sehingga interpretasi keamanan ekonomi dekat dengan konsep tradisional jaminan sosial dan keamanan ekonomi. Definisi ini mencerminkan penekanan yang diletakkan pada standar hidup individu. Keamanan ekonomi mengacu pada standar yang terjamin dan stabil hidup yang menyediakan sumber daya bagi individu dan keluarga di perlukan untuk berpartisipasi secara ekonomi, politik, sosial-budaya dan martabat komunitas mereka. Dengan demikian, keamanan ekonomi diperlakukan sebagai pemenuhan dasar kebutuhan manusia dan sebagai unsur yang sangat diperlukan bagi keamanan manusia (Chotimah et al., 2017). Mengenai pemenuhan kebutuhan keamanan manusia, keamanan ekonomi menjadi salah satu komponen keamanan manusia yang terancam karena adanya pengaruh dari tradisi budaya di India yang mengharuskan perempuan membawa mahar kepada pengantin laki-laki atau biasa disebut dengan tradisi *dowry*.

Pengaruh tradisi *dowry* sejauh ini menimbulkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dilakukan karena tidak dapat memenuhi permintaan *dowry* tambahan. Bahkan setelah menikah, permintaan *dowry* akan berlangsung secara terus menerus. Permintaan *dowry* tambahan yang dilakukan laki-laki dan keluarganya menimbulkan tindakan kekerasan terhadap perempuan jika tidak memenuhinya mengingat besarnya pemberian *dowry* sebelum menikah karena ekonomi perempuan itu rendah. Kekerasan akibat permintaan *dowry* tambahan ini menimbulkan ancaman kematian atau biasa disebut dengan *dowry death*. Dari pengaruh tradisi *dowry* ini akan menimbulkan ancaman bagi keamanan ekonomi manusia, terutama pada keluarga perempuan yang akan memberikan mahar kepada pengantin laki-laki sebelum dilakukan acara pernikahan (Siswanto, 2020).

(2) Keamanan Komunitas (*Community Security*)

Dari pengaruh tradisi *dowry* yang menyebabkan kematian bagi perempuan, atau biasa disebut *dowry death*. *Dowry death* ini sebagai ancaman keamanan komunitas bisa dianggap *femicide* yaitu pembunuhan terhadap perempuan akibat gender. Sejak kemunculan kasus *dowry death* sebagai sebuah fenomena baru, ribuan perempuan menjadi korban kasus ini yang menunjukkan peningkatan. Tidak hanya itu, juga banyak perempuan yang melakukan percobaan bunuh diri akibat sudah merasa terancam keamanannya dari tindakan diskriminasi yang dialami perempuan (Resen, 2012).

Menurut data dari *National Crime Record Bureau* (NCRB) pada tahun 2020 tercatat 6,843 kasus, dan kemudian di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan 3,85% yang mencatat 6,589 kasus kematian dibandingkan tahun sebelumnya. Namun menurut data dari NCRB juga ada sekitar 330 kasus kematian akibat mahar ditutup karena tidak cukup bukti dan menurut data Undang-undang terkait Lembaga mas kawin di India sebanyak 1,086 kasus juga ditutup dan 49 kasus lainnya di

pindahkan ke lembaga penanganan lain (Rajkumar, 2022). Tradisi *dowry*, selain menyebabkan tindakan kekerasan langsung yang berujung pada pembunuhan, tradisi *dowry* juga menjadi ancaman keamanan komunitas yang menyebabkan penolakan terhadap kehadiran anak perempuan dalam keluarga. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingginya tingkat aborsi terhadap janin perempuan serta pembunuhan bayi perempuan yang telah lahir (Resen, 2012).

Ada beberapa metode yang biasanya digunakan untuk membunuh bayi perempuan misalnya meminum getah beracun dari sejenis tumbuhan tertentu, menjejalkan tenggorokan bayi yang baru lahir, menutup bayi dengan kain basah hingga membiarkan tali pusarnya terlepas hingga mengalami kematian. Dari sekian banyak bayi perempuan yang dibunuh, negara India kini telah kelebihan kurang lebih 31 juta laki-laki akibat tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap kaum perempuan, yang salah satu bentuk muncul dalam bentuk kekerasan *dowry death* (Resen, 2012). Keamanan komunitas menjadi keamanan yang mengacu pada perilaku kekerasan terhadap perempuan karena tidak dapat memenuhi permintaan *dowry* yang berujung kematian (*dowry death*) tersebut yang mengakibatkan perempuan merasa tidak aman dan merasa terancam mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya itu, perempuan dari kasta rendah akan merasa terancam karena secara ekonomi mereka yang kurang sehingga sulit untuk memenuhi permintaan *dowry* tersebut.

(3) Keamanan Personal (*Personal Security*)

Keamanan personal mensyaratkan bahwa setiap individu harus terbebas dari perasaan takut akan ancaman, baik itu ancaman kekerasan fisik maupun beragam kekerasan lainnya yang ditujukan padanya. Seperti yang dijelaskan bahwa konsep ini tidak hanya berfokus pada kondisi bertahan hidup tetapi juga mencakup kesejahteraan dan martabat manusia, dengan demikian *dowry death* merupakan sebagai ancaman personal yang dapat mendefinisikan bagaimana kekerasan ini menimbulkan rasa takut serta merendahkan perempuan sebagai individu. Dalam kebanyakan kasus perempuan yang mengalami tindakan kekerasan tersebut, tidak dapat bantuan dan pertolongan dari siapa pun bahkan dari keluarganya sendiri. Hal ini disebabkan karena rendahnya nilai seorang perempuan di mata keluarganya sendiri menyebabkan sering kali kedatangan mereka untuk meminta pertolongan selalu diabaikan (Resen, 2012).

Melalui pandangan konsep keamanan manusia, kasus *dowry death* ini selain menjadi ancaman bagi perempuan secara personal, juga telah merendahkan martabat perempuan sebagai manusia. Kematian perempuan akibat kekerasan ini yang seharusnya mendapat penanganan sebagai tindakan kriminal, kadang justru diakui hanya sebuah kecelakaan biasa atau bunuh diri (Resen, 2012). Keamanan personal (individu) merupakan bentuk keamanan akibat *dowry* menjadi ancaman bagi perempuan secara individu mengalami kekerasan dan penindasan ketika tidak mampu memberikan *dowry* tambahan ini tidak hanya dialami segelintir individu, namun menjadi ancaman bagi ribuan perempuan di India. Tradisi *dowry* yang menimbulkan kematian ini merupakan ancaman keamanan personal yang mensyaratkan bahwa setiap individu harus bebas dari perasaan takut akan

ancaman, baik itu ancaman kekerasan maupun beragam kekerasan lainnya yang ditunjukkan padanya terutama pada perempuan di India.

Dalam pandangan konsep keamanan manusia, kematian akibat pengaruh tradisi *dowry* ini telah menjadi ancaman bagi keamanan ekonomi, keamanan komunitas, dan keamanan personal bagi perempuan. Konsep keamanan manusia ini juga menawarkan bahwa dalam bentuk keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab internasional, serta menjadikan individu sebagai agen perubahan. Meskipun telah ada usaha yang dilakukan pemerintah serta adanya respons dari dunia internasional terhadap isu kekerasan ini, nyatanya kekerasan ini sulit untuk dihapuskan, salah satunya adanya nilai-nilai yang dianggap menjadi sumber pembenaran terhadap terjadinya kekerasan ini.

KESIMPULAN

India merupakan negara yang masih menganut sistem kasta dan budaya dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Hal tersebut menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan menimbulkan kematian. Sistem budaya patriarki yang masih mengakar pada masyarakat India merupakan alasan utama yang menjadikan perempuan sebagai korban tindakan diskriminasi. Akibat adanya sistem budaya patriarki yang masih dianut oleh masyarakat India yang selalu menekankan *manpower* dalam seluruh bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang kemudian menyebabkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan diruang lingkup keluarga maupun ruang lingkup publik. Ketidaksetaraan inilah yang pada akhirnya menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan di India. Di India, terdapat beberapa macam kekerasan yang dilakukan masyarakat seperti kekerasan langsung, kekerasan kultural dan kekerasan struktural.

Namun dalam penelitian ini, memfokuskan pada tindakan kekerasan kultural yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan seperti kekerasan dalam hal tradisi yang dianut masyarakat India yang mengharuskan pihak perempuan yang memberikan *dowry* (pemberian mahar) kepada calon pengantin laki-laki sebelum menikah. Kekerasan karna tradisi *dowry* ini biasanya terjadi pada pihak pengantin perempuan yang tidak dapat memenuhi permintaan *dowry* dari keluarga pengantin laki-laki. Seiring banyaknya kasus tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang semakin meningkat menuntut terbentuknya keamanan manusia yang ditekankan oleh PBB bahwa keamanan yang dimaksud tidak hanya berfokus pada keamanan negara saja tetapi juga keamanan masyarakat dari ancaman yang menimbulkan kekerasan setiap individu manusia. Alasannya, di masyarakat mana pun ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dapat terjadi. Dari beberapa komponen keamanan manusia, kasus *dowry* ini dapat menjadi ancaman bagi keamanan ekonomi, keamanan komunitas, dan keamanan personal karena perempuan secara individu mengalami kekerasan dan penindasan yang menimbulkan kematian.

REFERENSI

Adinda FA, J. Q. (2019). Gagasan *Human security* dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan terhadap Draft Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perbandingannya dengan Kebijakan Kekerasan Seksual di Jepang. *Responsive*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.24198/responsive.v2i1.23016>

- Archer, C. (1983). *International Organization*. University of Aberdeen.
- Azwar, S. (2003). *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar.
- Burchill, S., & Linklater, A. (2011). *Teori-teori Hubungan Internasional* (M. Sobirin (trans.)). Penerbit Nusa Media.
- CARE India. (2016). *An Analysis of Perception of Domestic Violence and Efficacy of the Implementation of the PWDV ACT (2005) in Bihar* (No. 10951; ESocialSciences). <https://ideas.repec.org/p/ess/wpaper/id10951.html>
- Chotimah, H. C., Sande, J. P., C., E. D., Rizqia, D., Yusvarini, & Hong, S. (2017). Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep *Human security*. *Transformasi Global*, 4(1), 65–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/jtg.v4i1.70>
- Hediati, S. R. (2017). Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Korelasinya Terhadap Ketidaksetaraan Gender di China. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(1), 41–46. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/viewFile/16536/12070>
- India News Desk. (2022, August 30). *How safe are women in India? NCRB data shows over 15% rise in crime against women in 2021*. Financial Times. <https://www.financialexpress.com/india-news/how-safe-are-women-in-india-ncrb-data-shows-over-15-rise-in-crime-against-women-in-2021/2649298/>
- Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI. (2019, November 1). *Wujudkan Tempat Kerja Bebas Diskriminasi bagi Perempuan*. <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2395/wujudkan-tempat-kerja-bebas-diskriminasi-bagi-perempuan>
- Madak, N. G. (2019). *Peranan United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan di India Tahun 2015-2018* [Universitas Komputer Indonesia]. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1919/>
- Mareta, S. (2017). Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 24–37. <https://repository.unair.ac.id/68016/>
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivisik, Rasionalistik, Fenomenologik dan Realisme Metafisik Telaah studi Teks dan Penelitian Agama*. Rake Sarasin Press.
- Novia, D. R. M. (2018, May 6). *Setiap 15 Menit Terjadi Pelecehan Seksual di Negara Ini*. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/internasional/0162777/setiap-15-menit-terjadi-pelecehan-seksual-di-negara-ini>
- Novianty. (2021). *Peran UN Women dan Pemerintah India dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di India Periode 2015-2017* [UIN Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61275/1/NOVIYANTI.FI SIP.pdf>
- Pertiwi, W. S. (2021). Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 55–80. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.29>
- Rafiun, I. P. (2020). *Pengaruh CARE India dalam Upaya Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender di India* [Universitas Bosowa]. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/234/INDAH PERMATASARI 4516023026.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Rajkumar, A. (2022, August 30). *25% rise in dowry cases in 2021, reveals NCRB data*. The News Minute. <https://www.thenewsminute.com/article/25-rise-dowry-cases-2021-reveals-ncrb-data-167352>
- Ramadhan, I., & Ma'sumah, I. (2018). Mengkaji peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Perspektif Feminisme. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2), 144–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.871>
- Resen, P. T. K. (2012). Kekerasan terhadap Perempuan dan Keamanan Manusia (Studi Kasus: Dowry Murder di India). *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Udayana*, 1–23. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/f8e7df8e37b60498e64aa5995c70885c.pdf
- Sari, A. P. S., & Wahyuddin, Y. A. (2020). Budaya Machismo dan Kekerasan Gender (Femicide) di El Salvador. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 2(2), 51–69. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v2i2.50>
- Sari, A. Y., & Pattipeilohy, S. C. H. (2020). Ketidaksetaraan Gender sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Jepang. *Journal of International Relations UNIP*, 6(2), 358–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v6i2.27332>
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Siswanto, L. C. (2020). Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death. *Journal of International Relations UNIP*, 6(4), 517–524. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v6i4.28561>
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. (2007). *Human security* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203965955>
- Taylor, B. dan. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja.
- Tedjo, A. K., Ramadhan, M. D., Dirgantara, M. D., & Bahari, R. A. M. (2021). Tantangan Budaya dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusinya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 142–157. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.13310>
- United Nations Development Programme (UNDP). (1994). *Human Development Report 1994*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- World Health Organization (WHO). (2012). *Sexual Violence*. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf